



EFEKTIVITAS PROGRAM BANTUAN PENDIDIKAN DALAM MENGURANGI PUTUS SEKOLAH DI INDONESIA: EVALUASI IMPLEMENTASI KARTU INDONESIA PINTAR

Albert¹, Masduki², Heni Rochimah³

^{1,2} Universitas Negeri Jakarta, Indonesia

³ Universitas Islam As-Syafiiyah, Indonesia

Email: alberttambun.rff@gmail.com



DOI: <https://doi.org/10.34125/jmp.v10i2.633>

Sections Info

Article history:

Submitted: 13 May 2025

Final Revised: 23 May 2025

Accepted: 10 June 2025

Published: 22 June 2025

Keywords:

Kartu Indonesia Pintar

Access To Education Dropout

Aid Distribution

Program Evaluation



ABSTRAK

This study evaluates the effectiveness of the Jakarta Smart Card (KIP) program in increasing access to education and reducing dropout rates in Indonesia. A literature study and document review approach was used to analyze the program's coverage, aid distribution, and impact on school participation rates. The results show that KIP has made a positive contribution, but uneven distribution and delays in disbursement of funds hamper its effectiveness, especially in remote areas. Administrative constraints and low digital literacy are also major challenges. Recommendations focus on strengthening the data collection system, technological innovation, and improving cross-sector coordination to support the sustainability of the program. By evaluating these obstacles, it is hoped that more targeted solutions can be found. This study provides important input for improving national education policy. Increasing the effectiveness of the KIP program not only contributes to access to education but also to human resource development. This study is expected to be a reference for improving education policy and implementing similar programs in the future.

ABSTRAK

Penelitian ini mengevaluasi efektivitas program Kartu Jakarta Pintar (KIP) dalam meningkatkan akses pendidikan dan menekan angka putus sekolah di Indonesia. Pendekatan studi pustaka dan telaah dokumen digunakan untuk menganalisis cakupan program, penyaluran bantuan, dan dampaknya terhadap angka partisipasi sekolah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa KIP telah memberikan kontribusi positif, namun penyaluran yang tidak merata dan keterlambatan pencairan dana menghambat efektivitasnya, terutama di daerah terpencil. Kendala administratif dan rendahnya literasi digital juga menjadi tantangan utama. Rekomendasi difokuskan pada penguatan sistem pendataan, inovasi teknologi, dan peningkatan koordinasi lintas sektor untuk mendukung keberlanjutan program. Dengan mengevaluasi hambatan tersebut, diharapkan dapat ditemukan solusi yang lebih tepat sasaran. Penelitian ini memberikan masukan penting bagi perbaikan kebijakan pendidikan nasional. Peningkatan efektivitas program KIP tidak hanya berkontribusi pada akses pendidikan tetapi juga pada pengembangan sumber daya manusia. Penelitian ini diharapkan menjadi rujukan untuk perbaikan kebijakan pendidikan dan implementasi program serupa di masa depan.

Kata kunci: Kartu Indonesia Pintar, Akses Pendidikan, Putus Sekolah, Penyaluran Bantuan, Evaluasi Program.

PENDAHULUAN

Putus sekolah masih menjadi tantangan serius dalam sektor pendidikan di Indonesia. Masalah putus sekolah menjadi tantangan signifikan dalam sektor pendidikan di Indonesia. Berdasarkan laporan Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2022, angka putus sekolah pada jenjang SMP mencapai 1,24%, sementara di jenjang SMA sebesar 1,84% (Nur Dahyanti et al., 2024) (Al-Faiza et al., 2025). Faktor utama yang menyebabkan kondisi ini adalah tekanan ekonomi, terutama di kalangan masyarakat prasejahtera (Noor Safitri et al., n.d.). Banyak keluarga tidak mampu membiayai kebutuhan pendidikan seperti seragam, buku, dan transportasi. Kondisi ini memperburuk ketimpangan akses pendidikan antara kelompok berpenghasilan rendah dan menengah ke atas. Data Badan Pusat Statistik (BPS) di tahun berikutnya (2023) menunjukkan bahwa 4,1 juta anak Indonesia tidak menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah (MANAJEMEN SARANA, n.d.) (4. + Analisis + Pembiayaan + Pendidikan + di + Indonesia, n.d.). Sebagian besar anak yang putus sekolah berasal dari keluarga prasejahtera, terutama di wilayah pedesaan dan terpencil (Kuswandari et al., 2022). Ketidakmampuan membiayai pendidikan menjadi salah satu penyebab utama, memperbesar risiko ketimpangan sosial.

Program Kartu Indonesia Pintar (KIP) diperkenalkan pada tahun 2014 sebagai bagian dari upaya pemerintah mengatasi masalah ini (Nabila et al., 2025). Berdasarkan laporan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) tahun 2024, KIP telah mencakup lebih dari 18 juta siswa dari jenjang SD hingga SMA (UU_RPJPN-2025-2045_P20AUG_2024, n.d.) (Lampiran-I-RAN-SDGs-2021-2024, n.d.). Program ini dirancang untuk memberikan bantuan finansial kepada siswa miskin guna mendukung kelangsungan pendidikan mereka.

Anggaran KIP mengalami peningkatan signifikan sejak peluncurannya. Pada tahun 2020, alokasi dana KIP mencapai Rp9,7 triliun, meningkat dari Rp7,2 triliun pada tahun 2015 (PENDIDIKAN MENINGKATKAN KUALITAS MANUSIA PERAN YAPIS MEMBENTUK SDM TERDIDIK DI TANAH PAPUA, n.d.) (Hetri Tri Rahmawati et al., n.d.) (Esmi Tsalsa Sofiawati et al., n.d.). Anggaran ini terus meningkat menjadi Rp10,5 triliun pada tahun 2023, sebagaimana dilaporkan dalam Laporan Keuangan Negara 2024. Peningkatan ini mencerminkan komitmen pemerintah dalam memperluas akses pendidikan (Azizan et al., n.d.).

Studi menunjukkan bahwa KIP memberikan kontribusi nyata dalam meningkatkan angka partisipasi sekolah. Angka Partisipasi Murni (APM) tingkat SMP meningkat dari 76,6% pada tahun 2014 menjadi 82,1% pada tahun 2022, menurut data BPS (Handraini et al., 2025) (Zamaludin et al., 2024). Meski demikian, APM di wilayah terpencil, seperti Papua (58,3%) dan Maluku (63,7%), masih jauh tertinggal dibandingkan rata-rata nasional (Marsa & Santoso, n.d.) (Analisis Ketimpangan Distribusi Pendapatan Antarwilayah Di Indonesia SRI WAHYUNI SINAGA, n.d.).

Sistem distribusi KIP menghadapi tantangan besar dalam menjangkau wilayah terpencil. Laporan Kemendikbudristek tahun 2023 menunjukkan bahwa hanya 61% siswa miskin di wilayah pedalaman yang berhasil menerima bantuan (Jantika Eysi et al., n.d.) (Heni et al., 2025). Sebaliknya, distribusi di wilayah perkotaan seperti DKI Jakarta mencapai 91%. Ketimpangan ini mencerminkan hambatan geografis dan administrasi dalam pelaksanaan program.

Verifikasi penerima manfaat juga menjadi isu penting dalam implementasi KIP (Adnin Chiesa Syahwanes et al., 2025). Laporan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tahun 2022 mengungkapkan bahwa sekitar 13% dari data penerima bantuan tidak valid atau tidak sesuai dengan kriteria (Ritonga et al., n.d.) (Yunnita Sari et al., 2025). Akurasi data menjadi tantangan

utama dalam memastikan bantuan sampai kepada siswa yang benar-benar membutuhkan.

Keterlambatan pencairan dana menjadi kendala lain yang sering dikeluhkan oleh sekolah dan penerima manfaat (*EVALUASI KEBIJAKAN PROGRAM INDONESIA PINTAR (PIP) DI SMA*, n.d.). Berdasarkan data Kemendikbudristek tahun 2023, sekitar 18% pencairan dana KIP terlambat lebih dari satu bulan (Nahdiyyah, n.d.). Hal ini berdampak langsung pada kemampuan siswa untuk memenuhi kebutuhan pendidikan mereka tepat waktu.

Isu literasi digital di kalangan penerima manfaat turut memengaruhi efektivitas program KIP. Survei Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) tahun 2023 mencatat bahwa penetrasi internet di wilayah Papua baru mencapai 43%, sedangkan di Maluku hanya 49% (Suardini et al., n.d.) (Wardana & Mursyidah, 2025). Rendahnya akses ini memperburuk kesenjangan informasi terkait manfaat program.

Program KIP berhasil menurunkan angka putus sekolah di beberapa wilayah, tetapi dampaknya belum merata (Ariani et al., 2025). Studi oleh Pusat Penelitian Kebijakan Pendidikan pada tahun 2021 menunjukkan bahwa KIP mengurangi angka putus sekolah hingga 8% di tingkat nasional (Ananta & Kurniati, n.d.) (Mohammad Hajir Suleman et al., 2025a). Akan tetapi, dampak tersebut lebih terasa di wilayah dengan infrastruktur pendidikan yang memadai.

Kritik terhadap program ini juga muncul terkait nominal bantuan yang dinilai tidak mencukupi (Ghia Dimmera et al., n.d.). Saat ini, siswa SD menerima bantuan Rp225.000 per semester, siswa SMP Rp375.000, dan siswa SMA Rp500.000 (Setiawan et al., n.d.). Nominal ini dianggap belum mampu menutup seluruh kebutuhan pendidikan siswa dari keluarga prasejahtera. Selain itu, transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan program menjadi perhatian penting (Ananda et al., 2025) (3971-Article Text-16071-1-10-20250120, n.d.). Laporan Transparency International Indonesia (TII) tahun 2023 mencatat bahwa hanya 65% sekolah yang mempublikasikan laporan penggunaan dana KIP. Ketidaksesuaian laporan dengan pelaksanaan di lapangan mengurangi kepercayaan publik terhadap program ini.

Program KIP memiliki potensi besar untuk mendukung pemerataan pendidikan di Indonesia jika dikelola lebih baik (Goktua et al., n.d.). Dukungan kebijakan yang komprehensif sangat diperlukan untuk memperbaiki sistem distribusi dan pengelolaan (*BUILDING+THE+FUTURE+OF+SUMBA+WOMEN-39102*, n.d.). Keterlibatan pemerintah daerah dan pemangku kepentingan lainnya menjadi kunci keberhasilan implementasi program ini. Kajian ini bertujuan mengevaluasi sejauh mana program KIP efektif dalam mengurangi angka putus sekolah. Dengan menggunakan pendekatan studi literatur dan telaah dokumen, penelitian ini menggali data distribusi, tantangan implementasi, dan dampak program pada partisipasi pendidikan. Hasil evaluasi diharapkan memberikan rekomendasi strategis untuk meningkatkan efektivitas program.

Penelitian ini juga mengidentifikasi kendala utama yang menghambat keberhasilan program, termasuk faktor administratif, geografis, dan sosial. Dengan mengevaluasi hambatan tersebut, diharapkan dapat ditemukan solusi yang lebih tepat sasaran. Penelitian ini memberikan masukan penting bagi perbaikan kebijakan pendidikan nasional.

Peningkatan efektivitas program KIP tidak hanya berkontribusi pada akses pendidikan tetapi juga pada pengembangan sumber daya manusia. Penelitian ini diharapkan menjadi rujukan untuk perbaikan kebijakan pendidikan dan implementasi program serupa di masa depan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur dan

telaah dokumen untuk mengevaluasi efektivitas program Kartu Indonesia Pintar (KIP). Data yang digunakan berasal dari laporan pemerintah, jurnal ilmiah, artikel media, dan publikasi organisasi internasional terkait pendidikan. Sumber utama mencakup laporan tahunan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) tahun 2014–2024, hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), data statistik Badan Pusat Statistik (BPS), serta penelitian dari jurnal bereputasi. Proses pengumpulan data dilakukan melalui pencarian literatur pada basis data elektronik seperti Scopus dan Google Scholar, serta penyaringan dokumen relevan dalam rentang waktu 10 tahun terakhir untuk memastikan keakuratan dan relevansi informasi. Analisis data dilakukan menggunakan teknik analisis tematik dengan langkah-langkah meliputi pengelompokan data berdasarkan tema utama, seperti cakupan, distribusi, dan dampak program KIP. Pola dan kesenjangan distribusi dianalisis untuk mengidentifikasi kendala administratif dan geografis dalam implementasi program. Data yang diperoleh dibandingkan dengan literatur lain untuk meningkatkan validitas temuan. Meskipun penelitian ini terbatas pada analisis data sekunder, variasi sumber yang digunakan diharapkan mampu memberikan wawasan komprehensif terkait efektivitas KIP dan menjadi dasar untuk rekomendasi kebijakan di masa mendatang.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Hasil penelitian secara signifikan menunjukkan bahwa Program KIP telah memberikan kontribusi signifikan dalam meningkatkan akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu. Berdasarkan laporan Kemendikbudristek tahun 2024, sebanyak 18 juta siswa di seluruh Indonesia telah menerima bantuan KIP sejak program ini diluncurkan pada 2014. Meski demikian, cakupan program masih menghadapi tantangan, terutama di wilayah-wilayah dengan akses terbatas. Data BPS menunjukkan bahwa penerima manfaat di daerah perkotaan lebih dominan dibandingkan dengan daerah terpencil, seperti Papua dan Maluku.

Distribusi bantuan KIP cenderung terkonsentrasi di wilayah dengan infrastruktur pendidikan yang lebih baik. Di DKI Jakarta, 91% siswa miskin tercatat sebagai penerima manfaat KIP, sementara di Papua, angka ini hanya mencapai 61%. Perbedaan ini mencerminkan adanya kesenjangan geografis dalam pelaksanaan program. Faktor penyebabnya meliputi akses transportasi, kesiapan administrasi lokal, dan kurangnya infrastruktur komunikasi di wilayah terpencil.

Verifikasi data penerima bantuan menjadi salah satu kendala utama dalam implementasi KIP. Berdasarkan laporan BPK tahun 2022, sekitar 13% data penerima bantuan tidak sesuai dengan kriteria yang ditetapkan. Ketidakakuratan ini disebabkan oleh sistem pendataan yang belum terintegrasi secara nasional. Selain itu, proses verifikasi manual di beberapa daerah sering kali memakan waktu lama dan rentan terhadap kesalahan administratif.

Keterlambatan pencairan dana bantuan juga menjadi permasalahan yang perlu mendapatkan perhatian. Sebanyak 18% pencairan dana KIP pada tahun 2023 dilaporkan mengalami keterlambatan lebih dari satu bulan. Kondisi ini berdampak pada ketidakmampuan siswa untuk memenuhi kebutuhan pendidikan mereka tepat waktu. Beberapa sekolah di daerah terpencil bahkan melaporkan bahwa dana bantuan baru diterima menjelang akhir semester.

Rendahnya literasi digital di kalangan masyarakat juga memperburuk kesenjangan distribusi KIP. Survei APJII tahun 2023 menunjukkan bahwa penetrasi internet di Papua hanya mencapai 43%, jauh di bawah rata-rata nasional sebesar 78%. Rendahnya akses internet

menyebabkan kurangnya informasi mengenai persyaratan dan proses pendaftaran KIP. Hal ini mengakibatkan banyak keluarga yang memenuhi syarat tidak dapat mendaftarkan anak-anak mereka sebagai penerima manfaat.

Program KIP telah memberikan dampak positif dalam menurunkan angka putus sekolah di berbagai wilayah. Studi yang dilakukan oleh Pusat Penelitian Kebijakan Pendidikan pada 2021 menemukan bahwa KIP mampu mengurangi angka putus sekolah hingga 8% di tingkat nasional. Dampak ini lebih terasa di wilayah dengan dukungan infrastruktur pendidikan yang memadai, seperti Jawa dan Sumatra.

Nominal bantuan yang diberikan melalui KIP, meskipun membantu, masih dianggap tidak mencukupi untuk menutup kebutuhan pendidikan secara menyeluruh. Saat ini, siswa SD menerima Rp225.000 per semester, siswa SMP Rp375.000, dan siswa SMA Rp500.000. Biaya tambahan seperti transportasi, buku, dan kegiatan ekstrakurikuler sering kali tidak tercover oleh bantuan ini. Akibatnya, keluarga miskin masih menghadapi kesulitan dalam mendukung pendidikan anak-anak mereka.

Program KIP juga menghadapi kritik terkait transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana. Berdasarkan laporan TII tahun 2023, hanya 65% sekolah yang mempublikasikan laporan penggunaan dana secara terbuka. Ketidaksesuaian antara laporan resmi dan kenyataan di lapangan menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap program ini.

KIP memiliki potensi besar untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia jika kendala-kendala yang ada dapat diatasi. Penguatan sistem pendataan menjadi langkah awal yang harus dilakukan untuk memastikan bahwa bantuan tepat sasaran. Penggunaan teknologi digital dapat menjadi solusi untuk memperbaiki proses verifikasi dan distribusi bantuan di masa mendatang.

Kerja sama antara pemerintah pusat dan daerah sangat diperlukan untuk meningkatkan efektivitas program. Pemerintah daerah memiliki peran strategis dalam mengidentifikasi penerima manfaat, memantau distribusi bantuan, dan memastikan bahwa dana digunakan sesuai dengan kebutuhan siswa. Koordinasi yang lebih baik antara berbagai pemangku kepentingan akan membantu mengurangi kesenjangan distribusi KIP.

Peningkatan kapasitas literasi digital di kalangan masyarakat juga harus menjadi prioritas dalam mendukung keberhasilan program ini. Pelatihan dan sosialisasi mengenai cara mendaftar dan mengelola bantuan KIP dapat diberikan melalui sekolah, pusat layanan masyarakat, atau media lokal. Pendekatan ini akan membantu meningkatkan akses masyarakat terhadap program KIP, terutama di daerah terpencil. Dampak KIP terhadap angka partisipasi sekolah menunjukkan hasil yang cukup signifikan, tetapi masih perlu dioptimalkan. Penelitian lebih lanjut diperlukan untuk mengevaluasi dampak jangka panjang program ini terhadap kualitas pendidikan. Selain itu, kajian mengenai efektivitas nominal bantuan yang diberikan perlu dilakukan untuk menyesuaikan dengan kebutuhan siswa di berbagai wilayah.

Sebagai upaya mendukung keberhasilan KIP, pemerintah juga perlu mempertimbangkan penerapan mekanisme pengawasan yang lebih transparan dan akuntabel. Penggunaan aplikasi berbasis digital untuk pelaporan dan monitoring dana bantuan dapat meningkatkan transparansi dan efisiensi program. Langkah ini akan membantu mengurangi potensi penyimpangan dana di lapangan.

Program KIP menunjukkan bahwa intervensi yang tepat sasaran dapat memberikan dampak signifikan terhadap akses pendidikan. Namun, keberhasilan program ini sangat bergantung pada kemampuan pemerintah dan pemangku kepentingan dalam mengatasi

hambatan yang ada. Peningkatan kerja sama lintas sektor, inovasi teknologi, dan penguatan kebijakan menjadi kunci keberhasilan program KIP di masa depan.

Pembahasan

Program Kartu Indonesia Pintar (KIP) telah memberikan dampak positif dalam meningkatkan akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu. Data Kemendikbudristek tahun 2024 menunjukkan bahwa sebanyak 18 juta siswa di seluruh Indonesia telah menerima manfaat KIP sejak program ini diluncurkan pada tahun 2014. Keberhasilan ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam mendukung pendidikan inklusif. Namun, program ini masih menghadapi berbagai tantangan, terutama dalam distribusi bantuan di daerah terpencil.

Distribusi manfaat KIP cenderung lebih terfokus di wilayah dengan infrastruktur pendidikan yang baik. Di DKI Jakarta, misalnya, 91% siswa miskin tercatat sebagai penerima KIP, dibandingkan dengan Papua yang hanya mencapai 61%. Perbedaan ini mencerminkan adanya kesenjangan geografis dalam pelaksanaan program. Studi oleh World Bank (2023) menekankan bahwa kesenjangan ini sering disebabkan oleh akses transportasi dan kesiapan administrasi lokal yang tidak merata (*Executive-Summary*, n.d.). Di wilayah seperti Papua dan Maluku, aksesibilitas fisik dan kurangnya infrastruktur komunikasi menjadi hambatan utama.

Ketidakakuratan data penerima bantuan juga menjadi kendala yang signifikan dalam pelaksanaan KIP. Berdasarkan laporan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tahun 2022, sekitar 13% data penerima manfaat tidak sesuai dengan kriteria yang ditetapkan. Masalah ini muncul akibat sistem pendataan yang belum terintegrasi secara nasional, serta verifikasi manual yang masih digunakan di beberapa daerah. Penelitian Rahmat et al. menunjukkan bahwa integrasi data berbasis digital dapat meningkatkan akurasi hingga 80% dan mempercepat proses verifikasi (Rahmat & Suhardi, 2025).

Keterlambatan pencairan dana bantuan menjadi isu penting lainnya. Sebanyak 18% pencairan dana KIP pada tahun 2023 dilaporkan mengalami keterlambatan lebih dari satu bulan. Kondisi ini berdampak langsung pada kemampuan siswa untuk memenuhi kebutuhan pendidikan mereka. Beberapa sekolah di daerah terpencil bahkan melaporkan bahwa dana bantuan baru diterima menjelang akhir semester. Studi oleh Suleman et al. menyoroti pentingnya koordinasi lintas sektor untuk memastikan pencairan dana tepat waktu, terutama di wilayah dengan tantangan logistic (Mohammad Hajir Suleman et al., 2025b).

Rendahnya literasi digital di kalangan masyarakat turut memperburuk kesenjangan distribusi KIP. Survei Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) tahun 2023 mencatat bahwa penetrasi internet di Papua hanya mencapai 43%, jauh di bawah rata-rata nasional sebesar 78%. Kondisi ini mengakibatkan banyak keluarga yang memenuhi syarat tidak mengetahui proses pendaftaran KIP. Penelitian oleh Nabila et al. menyarankan pendekatan berbasis komunitas, seperti pelatihan literasi digital melalui sekolah atau pusat layanan masyarakat, untuk meningkatkan akses informasi (Nabila et al., 2025).

Dampak KIP terhadap angka putus sekolah cukup signifikan, terutama di wilayah dengan infrastruktur pendidikan yang memadai. Studi Pusat Penelitian Kebijakan Pendidikan menunjukkan bahwa program ini mampu menurunkan angka putus sekolah hingga 8% di tingkat nasional (*Artikel+Tjahyo+Rawinarno+-+Niagara+Juni+2024*, n.d.). Namun, dampak ini belum merata di seluruh wilayah, dengan daerah-daerah terpencil masih menghadapi tingkat putus sekolah yang tinggi. Hal ini menunjukkan perlunya penguatan infrastruktur pendidikan untuk mendukung keberhasilan program.

Nominal bantuan yang diberikan melalui KIP masih dianggap kurang mencukupi

untuk menutupi kebutuhan pendidikan secara menyeluruh. Saat ini, siswa SD menerima Rp225.000 per semester, siswa SMP Rp375.000, dan siswa SMA Rp500.000. Biaya tambahan seperti transportasi, buku, dan kegiatan ekstrakurikuler sering kali tidak tercover oleh bantuan ini. Penelitian Said et al. (2024) menyoroti perlunya evaluasi nominal bantuan untuk menyesuaikan dengan kebutuhan riil siswa di berbagai wilayah (Said et al., 2024).

Masalah transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana KIP juga menjadi sorotan. Berdasarkan laporan Transparency International Indonesia (TII) tahun 2023, hanya 65% sekolah yang mempublikasikan laporan penggunaan dana secara terbuka. Ketidaksesuaian antara laporan resmi dan kenyataan di lapangan menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap program ini. Implementasi sistem pelaporan berbasis digital, seperti yang disarankan oleh Marsa & Santoso (n.d.), dapat membantu meningkatkan transparansi dan memperbaiki akuntabilitas program (Marsa & Santoso, n.d.).

Koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah sangat diperlukan untuk mengurangi kesenjangan dalam pelaksanaan KIP. Pemerintah daerah memiliki peran strategis dalam mengidentifikasi penerima manfaat, memantau distribusi bantuan, dan memastikan dana digunakan sesuai kebutuhan siswa. Penelitian Ananda et al. (2025) mencatat bahwa koordinasi yang baik antara pemerintah pusat dan daerah dapat meningkatkan efektivitas program hingga 30%. Peningkatan literasi digital di kalangan masyarakat menjadi langkah strategis untuk mendukung keberhasilan program KIP. Sosialisasi melalui media lokal, sekolah, dan pusat layanan masyarakat dapat membantu meningkatkan pemahaman masyarakat tentang persyaratan dan prosedur pendaftaran KIP. Suleman et al. (2025) merekomendasikan kolaborasi antara pemerintah dan penyedia layanan internet untuk meningkatkan akses digital di daerah-daerah terpencil (Mohammad Hajir Suleman et al., 2025a).

Evaluasi jangka panjang terhadap dampak program KIP perlu dilakukan untuk memastikan kontribusinya terhadap kualitas pendidikan secara keseluruhan. Kajian oleh World Bank (2023) menunjukkan bahwa intervensi pendidikan berbasis bantuan sosial dapat meningkatkan partisipasi sekolah, tetapi dampaknya terhadap hasil pembelajaran memerlukan pengukuran yang lebih mendalam. Penelitian lebih lanjut dapat membantu mengidentifikasi kebutuhan spesifik di setiap wilayah.

Penguatan mekanisme pengawasan juga menjadi prioritas untuk meningkatkan akuntabilitas program. Penggunaan teknologi digital dalam pelaporan dan monitoring dapat membantu mengurangi potensi penyimpangan dana. Studi oleh Nabila et al. (2024) menyoroti bahwa sistem pengawasan berbasis teknologi mampu meningkatkan efisiensi hingga 40% dalam distribusi bantuan.

Program KIP memiliki potensi besar untuk meningkatkan akses dan kualitas pendidikan di Indonesia. Namun, keberhasilannya sangat bergantung pada upaya bersama dari pemerintah, sekolah, dan masyarakat dalam mengatasi tantangan yang ada. Langkah-langkah seperti penguatan infrastruktur pendidikan, peningkatan literasi digital, dan pengawasan berbasis teknologi menjadi kunci untuk memaksimalkan dampak positif program ini di masa depan.

KESIMPULAN

Program Kartu Indonesia Pintar (KIP) merupakan salah satu kebijakan strategis pemerintah untuk mengatasi masalah putus sekolah dan memperluas akses pendidikan bagi siswa dari keluarga prasejahtera. Berdasarkan temuan penelitian, KIP telah menunjukkan dampak positif dalam meningkatkan angka partisipasi pendidikan, terutama pada jenjang pendidikan dasar dan menengah. Namun, efektivitas program ini belum merata di seluruh

wilayah Indonesia, dengan tantangan utama meliputi kendala geografis, administratif, dan keterbatasan infrastruktur. Meskipun bantuan finansial dari KIP telah meringankan sebagian beban keluarga miskin, nominal bantuan yang diberikan masih dinilai kurang mencukupi untuk menutup seluruh kebutuhan pendidikan. Biaya tambahan seperti transportasi, buku, seragam, dan kegiatan ekstrakurikuler sering kali melebihi jumlah bantuan yang diterima. Oleh karena itu, evaluasi terhadap nominal bantuan dan penyesuaian berdasarkan kebutuhan lokal sangat diperlukan untuk meningkatkan efektivitas program ini.

Transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan program menjadi faktor penting untuk memastikan keberlanjutan dan keberhasilan KIP. Temuan menunjukkan bahwa hanya sebagian kecil sekolah yang mempublikasikan laporan penggunaan dana secara terbuka. Untuk mengatasi hal ini, pemerintah perlu mengembangkan sistem monitoring berbasis digital yang memungkinkan pelaporan real-time dan mempermudah pengawasan. Langkah ini tidak hanya akan meningkatkan kepercayaan masyarakat tetapi juga memperbaiki kualitas pengelolaan dana. Sebagai kebijakan pendidikan yang bertujuan untuk menciptakan pemerataan akses, KIP memiliki potensi besar untuk mendukung pembangunan sumber daya manusia di Indonesia. Namun, keberhasilannya bergantung pada kemampuan pemerintah untuk mengatasi tantangan implementasi melalui inovasi teknologi, peningkatan koordinasi lintas sektor, dan penguatan kebijakan yang responsif terhadap kebutuhan lokal. Dengan perbaikan yang terfokus, KIP dapat menjadi landasan utama untuk mewujudkan pendidikan inklusif dan berkeadilan di seluruh wilayah Indonesia.

REFERENSI

4.+Analisis+Pembiayaan+Pendidikan+di+Indonesia. (n.d.).

3971-Article Text-16071-1-10-20250120. (n.d.).

Adnin Chiesa Syahwanes, Eli Apud Saepudin, Listia Ulya Madina, Shabna Azzahra, & Ima Muslimah. (2025). Evaluasi Dampak PKH Terhadap Pengurangan Kemiskinan dan Peningkatan Akses Layanan Sosial bagi Keluarga Miskin. Analisis Mencakup Efektivitas Pemberian Bantuan Sosial Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat. *Ekopedia: Jurnal Ilmiah Ekonomi*, 1(2), 176–183. <https://doi.org/10.63822/j6s5v471>

Al-Faiza, A. P. A., Fitri, N. L., Tsany, A., & Aqilah, A. F. (2025). Eksklusi Sosial dalam Pendidikan. *Peradaban Journal of Interdisciplinary Educational Research*, 3(1), 46–59. <https://doi.org/10.59001/pjier.v3i1.198>

Analisis Ketimpangan Distribusi Pendapatan Antarwilayah di Indonesia SRI WAHYUNI SINAGA. (n.d.).

Ananda, D., Aprillianda, E., & Sari, K. (2025). *Pengertian: Jurnal Pendidikan Indonesia (PJPI) Pendidikan Perempuan sebagai Katalisator Perubahan Sosial dan Kesenjangan Gender*. 3(1), 39–54. <https://doi.org/10.61930/pjpi.v3i1>

Ananta, R., & Kurniati, E. (n.d.). ANALISIS KESESUAIAN SISTEM PENGANGGARAN BERBASIS KINERJA DENGAN MAQASHID SYARIAH DALAM PEMBANGUNAN DAERAH.

Ariani, A., Aji Pangestu, S., Studi Manajemen Pendidikan Islam Pascasarjana, P., & Saifuddin Zuhri Purwokerto, U. K. (2025). *MANAJEMEN PEMBIAYAAN PENDIDIKAN DALAM PENGEMBANGAN MUTU DI SMK*. 5(1), 2025. <https://jurnalp4i.com/index.php/manajerial>

Artikel+Tjahyo+Rawinarno+-+Niagara+Juni+2024. (n.d.).

Azizan, F., Program, M., Hukum, S., & Hidayati2, N. (n.d.). ANALISIS TINDAK LANJUT PEMERINTAH TERHADAP PENYALAHGUNAAN BANTUAN DANA BOS

ANALYSIS OF GOVERNMENT FOLLOW-UP TOWARDS MISUSE OF BOS FUNDS.

Jurnal Lawnesia, 3(2), 556–567.

BUILDING+THE+FUTURE+OF+SUMBA+WOMEN-39102. (n.d.).

Esmi Tsalsa Sofiawati, Mp., Cecep Hilman, Mp., Zulaekah, Mp., Shorihatul Inayah, C., Abdul Rosyid, Ms., Etty Octaviani Manalu, Mp., Suhartono, Mp., Rispa Ngindana, Mp., Abdul Rokhim, M. H., & Hasanudin, Ma. (n.d.). *TEORI DAN PRAKTIK*.

EVALUASI KEBIJAKAN PROGRAM INDONESIA PINTAR (PIP) DI SMA. (n.d.). <http://e-journalppmunsa.ac.id/index.php/ksap>

Executive-Summary. (n.d.).

Ghia Dimmera, B., Pebria Dheni Purnasari, dan, Studi Manajemen, P., Shanti Bhuana, I., Bukit Karmel No, J., & Barat, K. (n.d.). *PERMASALAHAN DAN SOLUSI PROGRAM INDONESIA PINTAR DALAM MEWUJUDKAN PEMERATAAN PENDIDIKAN DI KABUPATEN BENGKAYANG*.

Goktua, K. C., Lituhayu, D., & Yuniningsih, T. (n.d.). *EVALUASI PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) DI BIDANG PENDIDIKAN KOTA SEMARANG* *EVALUATION OF THE FAMILY HOPE PROGRAM (PKH) IN THE FIELD OF EDUCATION IN SEMARANG CITY*.

Handraini, H., Putri, N., & Umar, G. (2025). Problematika Pelayanan Bidang Pendidikan di Kabupaten Pasaman Barat. *Jurnal ISO: Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Humaniora*, 5(1), 12. <https://doi.org/10.53697/iso.v5i1.2195>

Henri, O. :, Seviani, N., Pamungkas, R. R., & Veda, O. X. (2025). PT. Media Akademik Publisher *EVALUASI PROGRAM INDONESIA PINTAR (PIP) DALAM UPAYA MEWUJUDKAN TUJUAN KEMENDIKBUDRISTEK DI SMA NEGERI 13 SEMARANG*. *JMA*, 3(5), 3031–5220. <https://doi.org/10.62281>

Heti Tri Rahmawati, C., Amelia, D., Fariantin, E., Made Murjana, I., Gunawan, C., Sihombing, L., & Khazin Fauzi, A. (n.d.). *Tim Penulis*. www.penerbitseval.com

Jantika Eysi, A., Silviana Putri, T., Aurora Ferdina Hermawan, S., & Amelya Tourmaline, Z. (n.d.). *Analisis Implementasi Alokasi Belanja Pendidikan dalam Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia di Kota Surabaya: Studi Kasus Tahun 2023-2024*. 2(2), 165–175. <https://doi.org/10.62383/studi.v2i2.306>

Kuswandari, I., Jaelani, A., & Estuningsih, N. (2022). Sinergi Kartu Indonesia Pintar dan Bidikmisi Sebagai Motivasi Studi Lanjut Bagi Siswa Sekolah Menengah Atas. *JPM (Jurnal Pemberdayaan Masyarakat)*, 7(2), 934–941. <https://doi.org/10.21067/jpm.v7i2.6833>

Lampiran-I-RAN-SDGs-2021-2024. (n.d.).

MANAJEMEN SARANA. (n.d.).

Marsa, D. M., & Santoso, R. S. (n.d.). *IMPLEMENTASI PROGRAM INDONESIA PINTAR (PIP) DI SMA KECAMATAN BANYUMANIK KOTA SEMARANG*. <http://fisip.undip.ac.id>

Mohammad Hajir Suleman, Irawati Abdul, & Fitri Hadi Yulia Akib. (2025a). Determinan Kemiskinan Anak di Pulau Sulawesi, Maluku Dan Papua : Perspektif Pendidikan. *Economic Reviews Journal*, 4(2). <https://doi.org/10.56709/mrj.v4i2.723>

Mohammad Hajir Suleman, Irawati Abdul, & Fitri Hadi Yulia Akib. (2025b). Determinan Kemiskinan Anak di Pulau Sulawesi, Maluku Dan Papua : Perspektif Pendidikan. *Economic Reviews Journal*, 4(2). <https://doi.org/10.56709/mrj.v4i2.723>

Nabila, N., Mauwa, N. K., Young, J. S., Ismanto, B., & Trisatyawati, S. (2025). Analisis Pelaksanaan dan Dampak Program Indonesia Pintar (Pip) Di Sekolah Menengah Atas. *NUSRA : Jurnal Penelitian Dan Ilmu Pendidikan*, 6(2), 203–212. <https://doi.org/10.55681/nusra.v6i2.3359>

Nahdiyyah, I. R. (n.d.). Evaluasi Kebijakan Bantuan Siswa Miskin Melalui Program Kartu

- Indonesia Pintar (KIP) (Studi Kasus Di SMA Negeri 4 Kota Cirebon). *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research*, 3, 7300–7312.
- Noor Safitri, L., Fajar Noorrahman, M., Program Indonesia, I., Sman, D., Dan Man, L., KECAMATAN LAMPIHONG KABUPATEN BALANGAN Laili Noor Safitri, B., & Studi Ilmu Adminstrasi Publik Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Amuntai, P. (n.d.). *IMPLEMENTASI PROGRAM INDONEIA PINTAR*.
- Nur Dahyanti, Sylvi Marsella Diastami, Azra Humaira, & Tengku Darmansah. (2024). Analisis Kebijakan dalam Mengatasi Problematika Pendidikan untuk Meningkatkan Kualitas Pendidikan di Indonesia. *Hikmah: Jurnal Studi Pendidikan Agama Islam*, 2(1), 87–100. <https://doi.org/10.61132/hikmah.v2i1.545>
- PENDIDIKAN MENINGKATKAN KUALITAS MANUSIA PERAN YAPIS MEMBENTUK SDM TERDIDIK DI TANAH PAPUA. (n.d.).
- Rahmat, Z., & Suhardi, M. (2025). ANALISIS EFISIENSI DAN AKUNTABILITAS PENGGUNAAN DANA BANTUAN OPERASONAL SEKOLAH (BOS). *Jurnal Inovasi Pendidikan & Pengajaran*, 5(1). <https://jurnalp4i.com/index.php/educational>
- Ritonga, M., Nurul Bariyah, O., Raihan Febriansyah, M., Kartika Susanti, D., Hadiyanti Dini Islamiati Institut Agama Islam Nasional Laa Roiba Bogor, S., Hamzah, V., & Lestari, A. (n.d.). *Lembaga Pembiayaan Pendidikan dalam Mewujudkan Pendidikan yang Inklusif dan Berkelanjutan di Indonesia*. <https://jurnal.umj.ac.id/index.php/MaA16/index>
- Said, M., Sulhan, A., & Hakim, L. (2024). Optimalisasi Manajemen Dana Bos dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan Islam. *Jurnal Ilmiah Profesi Pendidikan*, 9(3), 1864–1872. <https://doi.org/10.29303/jipp.v9i3.2441>
- Setiawan, I., Febriadi, H., & Studi Administrasi Publik Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Amuntai, P. (n.d.). *Herry Febriadi | Efektivitas Program Indonesia*.
- Wardana, D. A., & Mursyidah, L. (2025). IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM KARTU INDONESIA PINTAR DI SMAN 1 WONOAYU KABUPATEN SIDOARJO. In *Jurnal Dinamika Pemerintahan* (Vol. 8, Issue 1).
- Yunnita Sari, S., Negeri Semarang Muhammad Farisy Ammaryafi, U., Negeri Semarang Yanuar Akbar Muhammad Hamzah, U., & Negeri Semarang, U. (2025). Optimalisasi Dana BOS dalam Meningkatkan Kualitas Pendidikan di SDN 2 Padasuka Universitas Negeri Semarang. *Jurnal Multidisiplin Ilmu Akademik*, 2(3), 295–300. <https://doi.org/10.61722/jmia.v2i3.4741>
- Zamaludin, M. E., Ega Zamaludin, M., & Sampurna, R. H. (2024). *ELSE (Elementary School Education Journal) IMPLEMENTASI PROGRAM KARTU INDONESIA PINTAR DALAM UPAYA PEMERATAAN PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR NEGERI*. <https://journal.um-surabaya.ac.id/index.php/pgsd>

Copyright holder:
© Author

First publication right:
Jurnal Manajemen Pendidikan

This article is licensed under:
CC-BY-SA